

# **EVALUASI KEBIJAKAN FREE TRADE ZONE TERHADAP PENANAMAN MODAL DI KOTA TANJUNGPINANG**

Oleh:

**DWI EKA SEPTIANSYAH  
NIM.150563201060**

## **ABSTRAK**

Kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bertujuan menumbuhkan ekonomi dan menarik investasi didalam negeri. Salah satu daerah yang ditetapkan menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah Kota Tanjungpinang yang diatur melalui peraturan Pemerintah Pusat Nomor 47 tahun 2007, Tujuan penelitian ini mengevaluasi kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Bintang wilayah Kota Tanjungpinang dan menemukan kendala-kendala di dalam kebijakannya dengan melihat 6 variabel berdasarkan teori evaluasi oleh winarno. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Dalam memperoleh data yang akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan observasi lapangan yang kemudian hasilnya dideskripsikan sesuai dengan hasil temuan lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan dari sisi penerapan prinsip efektifitas masih belum bisa terpenuhi. Dari sisi prinsip efisiensi bahwa sumberdaya dalam penerapan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas kurang memadai. Dari sisi kecukupan menurut sumber-sumber bahwa kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintang wilayah kota tanjungpinang sudah di nilai cukup baik. Dari sisi perataan yaitu fasilitas dan kemudahan yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bisa di manfaatkan oleh investor maupun masyarakat luas tanpa ada perkecualian khusus dari para pelaku pelaksana kebijakan. Dari sisi responsifitas di dalam penerapan kebijakan di kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas, sikap masyarakat sangat mendukung di dalam pembangunan-pembangunan infastruktur. Dari sisi ketepatan suatu program yang di lakukan oleh para pelaku kebijakan sudah mulai berjalan dengan baik. evaluasi kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di wilayah Kota Tanjungpinang masih memiliki beberapa kekurangan yaitu masih lemahnya pengawasan terhadap barang bebas cukai yang beredar diwilayah Pabean, belum tercapainya tujuan dari kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, masalah sumber daya dan lahan, dan. Adapun saran yang peneliti berikan adalah Pemerintah pusat harus memberikan kejelasan terkait dengan kejelasan status lembaga dari Badan Pengusahaan Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang, perlunya dukungan finansial dari pemerintah daerah, ditingkatkannya pengawasan terkait dengan peredaran barang non cukai di wilayah Pabean di Kota Tanjungpinang serta Mempercepat pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur terutama meningkatkan sosialisasi dan promosi yang kepada sasaran kebijakan ,

**Kata kunci : Kebijakan,Free trade zone,Evaluasi.**

## **EVALUATION OF THE FREE TRADE ZONE POLICY ON INVESTMENT IN TANJUNGPINANG CITY**

**By:**  
**DWI EKA SEPTIANSYAH**  
**NIM.150563201060**

### ***ABSTRACT***

The policy of free trade and free ports is aimed at growing the economy and attracting domestic investment. One of the areas designated as a free trade area and free port is Tanjungpinang City which is regulated through Central Government regulation Number 47 of 2007, The purpose of this study is to evaluate the free trade and free port policies carried out by the Bintan Concession Agency for the Tanjungpinang City area and find obstacles in its policy by looking at 6 variables based on the evaluation theory by Winarno. This research is descriptive with a qualitative approach. The sampling technique used was purposive sampling technique. The informants in this study amounted to 8 people. In obtaining accurate data, the data collection techniques used were interviews and field observations, the results of which were then described in accordance with the findings in the field. The results of this study conclude from the point of view of the application of the principle of effectiveness, it still cannot be fulfilled. In terms of the efficiency principle, the resources for implementing free trade and free ports are inadequate. In terms of adequacy, according to sources, the free trade policy and the free port of Bintan in the Tanjung Pinang city area are considered quite good. In terms of smoothing, namely facilities and conveniences located in free trade areas and free ports, investors and the wider community can benefit from it without any special exceptions from policy implementers. In terms of responsiveness in implementing policies in the free port free trade area, the attitude of the community is very supportive in infrastructure development. In terms of the accuracy of a program carried out by policy actors, it has started to run well. the evaluation of free trade and free port policies in the Tanjungpinang City area still has several shortcomings, namely the still weak supervision of excise-free goods circulating in the Customs area, the objectives of the free trade and free port policy have not been achieved, resource and land problems, and. The suggestions given by the researcher are that the central government must provide clarity related to the clarity of the institutional status of the Bintan Concession Agency for the Tanjungpinang City Region, the need for financial support from the regional government, increased supervision related to the circulation of non-excise goods in the Customs area in Tanjungpinang City and Accelerate the construction of facilities, infrastructure and infrastructure especially to increase socialization and promotion towards policy targets,

**Keywords: Policy, Free trade zone, Evaluation.**